



## Gianyar Rancang

# Pendapatan 2016 Rp1,674 T

GIANYAR, NusaBali

Rancangan Pendapatan Daerah dalam APBD Gianyar TA (tahun anggaran) 2016 Rp1,674 triliun lebih. Hal ini terungkap dalam sidang penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Gianyar TA 2016 di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Senin (23/11).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta dihadiri Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata dan para pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Agung Bharata mengatakan, dalam rancangan APBD Gianyar TA 2016, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gianyar memprioritaskan pematapan pelayanan publik. Pelayanan itu dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sinergi perencanaan pembangunan pusat-daerah menuju Gianyar Bagus. Diantaranya, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan

kapasitas pelayanan birokras, pertanian, pariwisata, budaya dan ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan tata ruang. Serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Lanjut Agung Bharata, terkait kemampuan keuangan daerah

dan arah kebijakan penggunaan dana, dalam Rancangan APBD Gianyar TA 2016, Pendapatan Daerah direncanakan Rp1,674 triliun lebih. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp448,142 milyar lebih (26,77 persen), dana perim-



• NUSABALI/WILASA

Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta (kanan) menerima Nota RABD 2016 dari Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Senin (23/11).

bulan direncanakan Rp835,831 milyar lebih (49,92 persen), dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan Rp390,206 milyar lebih (23,31 persen). "Rencana PAD dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016, dibandingkan PAD Tahun Anggaran 2015 Rp370,679 milyar lebih. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp77,462 milyar lebih (20,90 persen).

Kata dia, perencanaan APBD ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Struktur PAD masih didominasi oleh rencana penerimaan dari pajak daerah dengan tetap mengupayakan intensifikasi penerimaan di luar pajak daerah, antara lain retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah.

Belanja Daerah direncanakan Rp1,958 triliun lebih dari Belanja Tidak Langsung Rp1,141 triliun lebih atau (58,28 persen) dan

Belanja Langsung Rp817,238 milyar lebih (41,72 persen). Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp 888,589 milyar lebih (77,84 persen) dan belanja lainnya Rp252,962 milyar lebih (22,16 persen). Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Rp52,317 milyar lebih (6,40 persen), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp309,138 milyar lebih (37,83 persen) dan Belanja Modal Rp455,781 milyar lebih (55,77 persen).

Defisit anggaran dalam Rancangan APBD Gianyar 2016 Rp284,609 milyar lebih. Hal ini terjadi karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan. Namun defisit anggaran tahun 2016 tersebut akan dapat ditutupi, terutama bersumber dari penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran 2015 yang saat ini sedang berjalan. @ Isa

Edisi : Seksa, 24 November 2015

Hal : 6



## Pembangunan Gedung Kesenian Tak Bisa Terealisasi Tahun 2016

MANGUPURA, NusaBali  
Pembangunan gedung serbaguna untuk ruang pertemuan dan pertunjukan kesenian di kompleks Puspem Badung 'gabeng'. Padahal detail engineering design (DED) mega proyek yang masuk di pos Dinas Cipta Karya (DCK) Badung dikabarkan sudah rampung. Tapi justru tak masuk dalam RAPBD Badung tahun 2016. Kabarinya rencana pembangunan gedung serbaguna baru dapat terlaksana pada 2017.

Sejak rencana pembangunan gedung serbaguna muncul, banyak pihak menyambut positif. Pasalnya, Pemkab Badung sampai sekarang belum memiliki gedung yang representatif untuk jadi tempat pertunjukan kesenian, seperti festival seni budaya, maupun agenda-agenda rapat besar yang mengundang peserta dalam jumlah banyak. Sementara gedung Kertha Gosana di kantor bupati kerap tak menampung peserta bila dalam jumlah besar.

Kepala Dinas Kebudayaan Badung IB Anom Bhasma mengaku kalangan seniman antusias dan menyambut baik rencana pemerintah membangun gedung yang bisa digunakan untuk tempat pertunjukan. Menurut dia, selama ini tak jarang pertunjukan seni tak berjalan maksimal karena berada di ruang terbuka, yang bila musim penghujan mengganggu pementasan.

"Masyarakat, terutama dari kalangan seniman menyambut baik rencana pembangunan gedung serbaguna. Jadi bila ada pertunjukan seni bu-

daya bisa di gedung serbaguna," ucapnya, Senin (23/11).

Sayangnya, rencana ini tak bisa terealisasi tahun ini maupun tahun depan. Pemerintah berdalih, kebutuhan anggaran belum masuk pada RAPBD 2016.

Terkait hal tersebut, Anom Bhasma tak menampik. "Masalah itu saya tidak banyak tahu, karena ada DCK. Tapi yang jelas DED-nya sudah ada," tegasnya. Ditanya alasannya, dia menyatakan, pada waktu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2016, DED pembangunan gedung serbaguna masih dalam proses kajian. Sehingga, anggaran yang dibutuhkan proyek ini tak bisa masuk di KUA PPAS dan RAPBD 2016.

Kapan ditargetkan pembangunannya? Ia menjelaskan bila tidak ada halangan pada tahun 2017. "Kemungkinan tahun 2017 baru mulai dibangun. Kalau saya lihat DED-nya perlu waktu sekitar 1,5 tahun pengerjaan," beber Anom Bhasma. Dia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk proyek pembangunan gedung serbaguna di atas Rp 80 miliar.

Masih terkait megaprojek tersebut, Anom Bhasma menjelaskan berdasarkan DED, gedung serbaguna yang nanti dibangun akan mampu menampung sekitar 2.000 orang. Dengan begitu, bila Pemkab mengadakan kegiatan yang berskala besar bisa menggunakan gedung ini. Termasuk untuk kegiatan seni dan budaya.

Kepala DCK Badung Ni

Putu Dessy Dharmayanti belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan telepon tidak ada jawaban.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda, selaku juru bicara pemerintah tak menyangkal bila pembangunan gedung serbaguna yang rencana akan dinamai Graha Mangu-mandala tak bisa terlaksana tahun ini. Pasalnya, DED proyek sedang dikerjakan untuk pemantapan.

"Saat DED sedang dikerjakan, KUA PPAS sudah ditetapkan. Ini yang menjadi kendala," jelas Raka Yuda.

Selain itu, menurut dia, di lokasi rencana pembangunan masih ada gedung bekas BPPT dan yang lain. Sehingga perlu proses penghapusan oleh Bagian Aset dan perlu pelelangan pembongkarannya. Sehingga, tidak mungkin dibangun tahun 2016. "Kalaupun tahun 2016 bisa diproses, kemungkinan dimulai pada anggaran perubahan 2016. Dan proyek akan menjadi multiteras, karena perkiraan memerlukan waktu 13 bulan," katanya.

Mengenai estimasi biaya, untuk bangunan gedung saja sebesar Rp 47.415.959.418. Kemudian untuk interior Rp 7.500.000.000, tata lighting Rp15.541.282.807, penataan halaman (jalan, parkir sederhana, dan sarana taman candi bentar gerbang) Rp 22.394.179.675. "Jadi totalnya sekitar Rp 99 miliar," beber Raka Yuda sembari menyatakan anggaran ini belum termasuk anggaran pemasangan PLN. asa



# Pemkab Tetap Kelola Terminal Mengwi

**Pemkab Badung harus mengalokasikan Rp 1,7 miliar untuk pengelolaan Terminal Mengwi, akibat ada penundaan pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah pusat.**

MANGUPURA, NusaBali

Tertundanya pengambilalihan Terminal Mengwi, hingga Desember 2016, membuat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Badung kelimpungan. Karena Dishubkominfo harus menyiapkan anggaran pen-

gelolaan untuk operasional satu-satunya terminal tipe A di Bali itu untuk satu tahun ke depan.

"Iya setelah ada aturan baru dari Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Terminal Mengwi akan diambilalih pada Desember 2016," kata Kepala Dishubkominfo Badung I Wayan Weda Dharmaja, Senin (23/11). Sebagai konsekuensi pemerintah daerah harus siap dengan anggaran pengelolaan.

Pejabat asal Sembung, Mengwi, itu menjelaskan persiapan pengambilalihan kewenangan Terminal Mengwi sebenarnya sudah tuntas. Persiapan yang dimaksud meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana, dan dokumen (P3D). Namun apa daya, belakangan muncul peraturan anyar dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, intinya pengambilalihan oleh pusat

baru akan dilaksanakan akhir tahun 2016. Padahal menurut Weda Dharmaja, sebelumnya pemerintah pusat sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan menarik pengelolaan terminal tipe A pada 31 Desember 2015.

Kini dengan penundaan tersebut, mau tidak mau pemerintah daerah harus mengelola operasional Terminal Mengwi paling tidak setahun ke depan. Hal itu lantaran terminal yang belum menunjukkan tanda-tanda beroperasi maksimal tersebut memerlukan suntikan dana untuk operasional.

Yang menarik, karena rencana pengambilalihan akan dilakukan pada 2015, Dishubkominfo Badung tak lagi memasang anggaran tahun 2016. Tapi setelah ada aturan baru, pihaknya harus memasang anggaran lagi. Mengenai hal ini, Weda Dharmaja menyatakan telah menyiapkan anggaran



Sambungan. ---

sekitar Rp 1,7 miliar lebih pada RAPBD 2016. "Jadi sekarang kami poskan anggaran operasional pada RAPBD induk 2016," katanya.

Anggaran ini akan dipergunakan sepenuhnya untuk pengelolaan. Seperti biaya pemeliharaan fasilitas gedung, gaji pegawai kontrak, tenaga kebersihan, dan lain-lain. "Semua *include* dalam dana itu," bebarnya.

Terkait penundaan pengambilalihan Terminal Mengwi sebelumnya sempat disesalkan anggota DPRD Badung. Ketua Komisi II DPRD Badung Nyoman Dirgayusa, menyatakan anggaran untuk Terminal Mengwi dari awal memang tidak disiapkan lagi. Termasuk di KUA/PPAS anggaran terminal juga sudah tidak dipasang lagi. "KUA/PPAS sudah tidak masuk. Artinya sesuai aturan mestinya tidak bisa karena KUA/PPAS *kan* sudah ditandatangani," tegasnya. **asa**



PETUGAS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung mencatat kedatangan bus yang masuk di Terminal Mengwi, Badung, Senin (23/11). ● NUSABALI/YUDA

Edisi : Sekeloa, 24 November 2015  
Hal : 2



## Perusahaan Air Minum Langgar Perda ABT ✓

TABANAN, NusaBali

Tim Yustisi Pemkab Tabanan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di empat perusahaan air minum yang berada di wilayah Kecamatan Tabanan dan Kerambitan, Senin (23/11). Dari empat perusahaan air minum yang didatangi, satu di antaranya yakni PT Tirta Rejeki Dewata belum memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan Perda Air Bawah Tanah (ABT).

PT Tirta Rejeki milik Hanadi Kristanto berlokasi di Jalan Rajawali Nomor 5, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan. Perusahaan air minum ini belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri, dan Izin Pemanfaatan Sumber Air. Kasatpol PP Tabanan I Wayan Sarba mengatakan, PT Tirta Rejeki yang memproduksi air minum Duta sedang dalam proses pengurusan izin.

Sarba menjelaskan, memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengurus dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan Perda ABT. Terlebih Perda ABT baru disahkan pada tahun 2015 ini. "Mengingat Perda ABT baru disahkan pada tahun 2015, para pengusaha sedang dalam proses pengurusan izin," tandasnya. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Tabanan ini pun mengarahkan perusahaan lainnya di Tabanan agar segera mengurus pengelolaan lingkungannya sesuai Perda ABT tahun 2015.

Sarba menambahkan, selain menyasar air minum Duta, juga melakukan pengecekan

ke PT Tirta Sukses Perkasa Tabanan yang memproduksi air minum Club. Perusahaan air minum yang berlokasi di Banjar Penyalin, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan ini telah melengkapi seluruh perizinannya. Hanya saja, belum memiliki dokumen lingkungan karena masih dalam proses pengurusan. Masih di desa yang sama, Tim Yustisi juga mampir ke CV Tirta Multi Jaya yang memproduksi air kemasan merk Tiro. Perusahaan air kemasan milik I Gede Made Wijaya dengan karyawan 16 orang ini sudah memiliki izin. Begitu juga dengan kelengkapan dokumen lingkungannya.

Satu lagi perusahaan air kemasan yang disidak yakni CV Satria Putra Jaya milik Nugroho Sindarto yang memproduksi air mineral Atria. Perusahaan ini telah memiliki izin secara lengkap. Sarba yang mantan Camat Marga ini menjelaskan, sidak digelar untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tabanan. Sidak dipimpin Ketua Tim Yustisi dari Satpol PP Tabanan I Wayan Kinten dan Oka Pariadnyana dari Bidang Lingkungan Hidup (BLH).

Ditegaskan, perusahaan harus melengkapi dokumen masing-masing Surat Izin Tempat usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dokumen lingkungan, ijin lingkungan, izin pemanfaatan sumber air, dan UKL/UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemanfaatan Lingkungan). **k21**



TIM gabungan sidak di salah satu perusahaan air minum di Kecamatan Tabanan, Senin (23/11). • IST

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 7



## Pj Walikota Denpasar Sampaikan RAPBD 2016

★ Optimalisasi PAD, Pendapatan Daerah Dirancang 1,87 Triliun Lebih



Pj Walikota Denpasar AA Gede Geriya pada pembukaan sidang, Senin (23/11) menyerahkan pengantar Ranperda APBD Kota Denpasar dan enam Ranperda Kota Denpasar kepada Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede yang nantinya dapat dilakukan pembahasan bersama Fraksi DPRD Kota Denpasar.

DENPASAR, NusaBali

Pembukaan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar berlangsung Senin (23/11) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Sidang yang dibuka Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, mengagendakan pidato pengantar Pj Walikota Denpasar tentang penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kota Denpasar tahun Anggaran 2016 dan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar. Sidang, kemarin, dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Denpasar, Pj Walikota AA Gede Geriya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan Pimpinan SKPD Pemkot Denpasar.

Pj Walikota Denpasar AA Gede Geriya mengatakan, kebijakan yang akan dilakukan

dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan di Kota Denpasar melalui optimalisasi PAD. Mengacu pada kebijakan tersebut Pendapatan Daerah tahun anggaran 2016 dirancang sebesar Rp 1,87 Triliun lebih yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Sementara PAD Denpasar dirancang sebesar Rp 715,32 Milyar lebih yang berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Dari presentase kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 38,14 persen, yang membawa Denpasar dikategorikan sebagai kota yang memiliki kemampuan fiskal cukup tinggi serta telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Lebih lanjut Geriya mengatakan, dana perimban-

gan dalam Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp 794,01 Milyar lebih yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dirancang sebesar Rp 69,89 Milyar lebih. Dana Alokasi Umum dirancang Rp 661,79 Milyar lebih, Dana Alokasi Khusus dirancang sebesar 62,32 Milyar lebih.

Sementara kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung diarahkan untuk memenuhi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga. Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp 879,15 Milyar lebih, Belanja Hibah dirancang Rp 34,09 Milyar lebih, belanja bantuan sosial dirancang Rp 2,67 Milyar lebih, belanja bagi hasil dirancang Rp 57,94 Milyar lebih, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik dirancang sebesar Rp 152,19 Milyar lebih, dan belanja tidak terduga dalam Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp 3 Milyar. Dalam kesempatan tersebut Pj Walikota juga menyampaikan enam Ranperda yang terdiri dari Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Pemondokan, Ranperda Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dan Ranperda tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. @

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 3



Proyek IGD RSUD Buleleng

## Siapkan Rp 38 Miliar untuk Pembangunan Tahap II



GEDUNG IGD RSUD Buleleng yang pembangunannya hampir rampung pada tahap I, dan akan digelontor anggaran Rp 38 miliar untuk pembangunan tahap II.

SINGARAJA, NusaBali

Proyek pembangunan gedung baru Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng, tahap pertama sudah selesai 90 persen. Bangunan megah berlantai empat tersebut baru dapat diresmikan dan dibuka setelah menjalani penyempurnaan pembangunan tahap kedua tahun ini. Dalam rencana pembangunan tahap lanjutan tersebut, dianggarkan biaya sebesar Rp 38 Miliar.

"Tahun ini baru bisa selesai pembangunan tahap pertama yang kemarin dianggarkan dana sebesar Rp 51 miliar. dan tahun ini dianggarkan kembali sebesar Rp 38 miliar untuk penyempurnaan bangunan fisik, dari APBD," ujar Direktur Utama RSUD Buleleng, dr Gede Wiartana, Senin (23/11) kemarin.

Sejumlah anggaran tersebut akan digunakan untuk perlengkapan interior seperti lift yang memakan biaya sangat mahal. Selain menyiapkan anggaran pembangunan fisik tahap kedua, pihaknya juga mengaku telah menyusun ancap-ancang untuk

menyusun anggaran yang diperlukan kebutuhan peralatan di gedung yang baru.

Setidaknya untuk total 86 ru-

angan dari empat lantai tersebut diperlukan anggaran pengadaan alat sebesar Rp 20 Miliar. Yang paling banyak akan memakan

anggaran untuk pengadaan alat adalah untuk perlengkapan tempat tidur, termasuk lemari dan fasilitas lainnya di 24 ruang pera-

watan VIP.

Dirut menjelaskan, sesuai dengan rencana pembangunan bangunan IGD empat lantai tersebut akan digunakan untuk tindakan emergency di lantai I. Sedangkan dilantai dua disediakan 32 bed untuk ICCU, IC, HCU dan NICU. Sisanya 24 bed di lantai tiga akan digunakan untuk ruang perawatan VIP, dan lantai empat dirancang untuk ruang pertemuan.

Selain melakukan penyempurnaan bangunan fisik dan kelengkapan peralatan, juga akan dilakukan penambahan tenaga medis. Diantaranya 150 orang tenaga medis yang terdiri dari perawat, dokter, satpam termasuk cleaning service. Penambahan tenaga medis tersebut menurut Wiartana akan dilakukan dua tiga bulan sebelum peresmian yang ditargetkan pada akhir tahun 2016 mendatang.

Seluruh tahap penambahan tenaga medis akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemkab Buleleng. Mereka yang nantinya diterima akan digaji menggunakan dana penghasilan RSUD sendiri. **k23**

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 4



# RAPBD 2016 Defisit Rp 44 Miliar

## ★ Fraksi PDIP Absen di Rapat Paripurna

Tingginya defisit, karena terjadinya selisih antara pemasukan dengan pengeluaran anggaran di R-APBD 2016, yang dirancang mencapai Rp 1,538 triliun.

AMLAPURA, NusaBali

Defisit di RAPBD Karangasem tahun 2016, tetap tinggi, yakni mencapai Rp 44,5 miliar. Meski demikian SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun 2015 mencapai Rp 73,3 miliar sudah dirancang digunakan menutupinya. Tingginya defisit karena terjadinya selisih antara pemasukan dengan pengeluaran anggaran di R-APBD 2016, yang dirancang mencapai Rp 1,538 triliun.

Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus



● NUSABALI/NANTRA

PENJABAT Bupati Ida Bagus Ngurah Arda (kiri) serahkan draf R-APBD 2016 diterima Ketua DPRD I Nengah Sumardi di DPRD, Senin (23/11).

Arda, dalam Rapat Paripurna Penyerahan draf R-APBD 2016, di Ruang Rapat DPRD, Senin (23/11). Nominal itu mengalami kenaikan 2,25 persen atau Rp 312,8 miliar dari sebelumnya Rp 1,226 triliun.

Sebagai perbandingan defisit APBD tahun 2015 mencapai Rp 43,414 miliar. Defisit tersebut jauh mengalami peningkatan

di bandingkan APBD 2014 Rp 7,366 miliar. Tetapi masih di bawah defisit APBD 2013 Rp 136,16 miliar, APBD tahun 2012 sebesar Rp 153,29 miliar, APBD tahun 2011 Rp 20 miliar. Sedangkan defisit APBD tahun 2010 Rp 55,14 miliar, APBD tahun 2009 Rp 95,331 miliar dan APBD 2008 Rp 72,35 miliar.

IB Arda memaparkan, target

Edisi : Selasa, 24 November 2015  
Hal : 8



Sambungan - - -

PAD tahun 2016 Rp 233,69 miliar, mengalami kenaikan Rp 28,36 miliar atau 25,16 persen, dari Rp 225 miliar di tahun 2015.

Sedangkan DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) di tahun 2016, ternyata belum juga secara resmi diterima Pemkab Karangasem tetapi telah dimasukkan ke dalam draf R-APBD 2016. Alasan IB Arda, karena DAU Rp 732,9 miliar dan DAK 117,105 miliar yang didapatkan berdasarkan informasi resmi dari pusat.

"Anggaran untuk belanja tak langsung atau untuk membayar gaji pegawai mencapai Rp 979,57 miliar, belanja langsung atau untuk pembangunan fisik mencapai Rp 603,9 miliar," kata IB Arda.

Menariknya dalam sidang kemarin, 11 anggota DPRD dari Fraksi PDIP kompak absen dalam paripurna dengan agenda Penyerahan draf R-APBD 2016 dari tangan Penjabat Bupati ke tangan Ketua DPRD I Nengah Sumardi.

Pembahasan berikutnya, secara marathon 24-27 November dari pagi hingga tengah malam, dengan target tuntas Senin

(30/11) ditutup dengan Rapat Paripurna Persetujuan R-APBD untuk diajukan jadi APBD 2016.

Disinggung absennya seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang berjumlah 11 orang, Sekwan DPRD I Wayan Ardika meluruskan. "Fraksi PDIP bukannya memboikot acara penyerahan draf R-APBD, tetapi sebelumnya telah bersurat minta izin tidak hadir, sehubungan ada acara partai di Denpasar," kata I Wayan Ardika.

Ketua Komisi III DPRD I Gusti Agung Dwi Putra, juga membenarkan hal itu. Sehingga yang hadir hanya anggota DPRD dari Partai Golkar 13 kursi, Fraksi Partai Nas-Dem, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing 5 orang, Fraksi Bhinneka 4 orang, seret anggota dari PKS.

Ketua Fraksi PDIP Gede Dana membenarkan seluruh anggotanya, menghadiri acara konsolidasi partai sehubungan kedatangan Ketua DPP Megawati Soekarnoputri di Sekretariat DPD PDIP Bali. "Saat rapat Bamus kami Fraksi PDIP sudah inta izin, tidak bisa hadir," kata I Gede Dana. **k16**



## Tahun 2016, Bangli Rancang Pendapatan Rp 1 Triliun Lebih

BANGLI, NusaBali

DPRD Bangli tidak mau menunda-menunda waktu lagi dalam melakukan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2016. Terbukti, begitu usai menetapkan dua Ranperda, pihak DPRD Bangli bersama eksekutif langsung mengeber Ranperda APBD Tahun 2016, Senin (23/11). Sidang yang mengagendakan Penyampaian Ranperda tentang penyertaan modal pada PT BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara Serta Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2016, dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata dan dari eksekutif dipimpin oleh Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra.

Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra, dalam kesempatannya itu, menyebutkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD Tahun 2016, dirancang Rp 1,24 Triliun. Dia berharap ke depan agar tetap diupayakan peningkatan pendapatan yang lebih signifikan, yang sudah tentu dibarengi dengan kerja keras se seluruh aparat, khususnya penghasil PAD. "Kita berharap rancangan ini, dapat dijadikan cemeti bagi aparatur untuk bekerja lebih giat lagi," ujarnya.

Kata dia, pendapatan daerah tersebut dirancang bersumber dari PAD Rp 90 miliar lebih, yang berasal dari penerimaan pajak daerah Rp 11 miliar, retribusi daerah Rp 22 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2 miliar dan lain-lain PAD yang

sah Rp 53 miliar. Kemudian, dana primbangan dalam tahun 2016, direncanakan Rp 690 miliar, yang berasal dari bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp 19 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 568 miliar dan Dana Alokasi khusus (DAK) Rp 102 miliar. "Pendapatan daerah juga dirancang, yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 243 miliar," terangnya.

Pj Mahendra lanjut menjelaskan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 704 miliar, yang terdiri belanja pegawai Rp 582 miliar, belanja hibah Rp 400 juta, belanja bantuan sosial (bansos) Rp 500 juta, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 3 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa Rp 117 miliar dan belanja tidak terduga Rp 1 miliar. "Untuk belanja langsung, dirancang Rp 419 miliar. Dimana, belanja langsung ini sebagian besar diarahkan untuk memberi dukungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat mendesak dan segera mendapatkan penyelesaian diberbagai bidang," paparnya.

Lanjut dia, pembiayaan daerah dalam APBD Rp 99 miliar, sementara penerimaan pembiayaan dirancang Rp 109 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 5 miliar. "Jika dilihat dari komposisi jumlah pendapatan dan belanja, maka posisi RAPBD 2016 dirancang defisit Rp 99 miliar," pungkasnya. w

Edisi : Selasa, 24 November 2015

Hal : 8